

**Nama : Annisa Luthfiyyah**

**NPM : 2313031010**

**Kelas : A**

1. Struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya belum efisien, karena porsi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru terlalu besar, yaitu mencapai 68%, namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari rendahnya skor literasi dan numerasi, yang menunjukkan bahwa output yang dihasilkan belum sebanding dengan besarnya input anggaran. Selain itu, terdapat ketimpangan distribusi guru, di mana terjadi kelebihan guru di perkotaan dan kekurangan di daerah pedesaan atau terpencil.

Oleh karena itu, bagian yang perlu direalokasi adalah anggaran gaji guru, bukan dengan mengurangi secara langsung, tetapi dengan meningkatkan efisiensi melalui redistribusi guru ke daerah yang kekurangan serta penerapan evaluasi kinerja yang lebih ketat. Di sisi lain, anggaran untuk infrastruktur dan digitalisasi perlu ditingkatkan, khususnya di daerah pedesaan, karena keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan. Penyediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat menarik minat guru untuk bertugas di daerah terpencil, mengingat selama ini hambatan utama adalah akses yang sulit dan sarana yang kurang memadai.

Selain itu, program bantuan siswa juga perlu ditingkatkan untuk mencegah angka putus sekolah, terutama di daerah pedesaan. Banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi, seperti tidak mampu membeli perlengkapan sekolah atau membayar biaya pendidikan. Dengan adanya bantuan seperti beasiswa dan subsidi, diharapkan siswa tetap dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan.

Terakhir, anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kualitas guru juga perlu diperkuat. Masih terdapat fenomena di mana kualitas tenaga pendidik belum merata, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pemerataan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan agar mutu pendidikan lebih setara.

2. Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah, yang terlihat dari dominasi APBD sebagai sumber utama pendanaan. Kondisi ini berisiko terhadap stabilitas pembiayaan karena sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah, serta membatasi inovasi dalam pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, pelibatan sektor swasta dan skema pembiayaan alternatif menjadi penting untuk mengurangi beban pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Model pembiayaan yang tepat adalah blended financing, yaitu kombinasi antara dana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor swasta dapat berperan melalui program CSR untuk mendukung digitalisasi dan pelatihan guru, sementara kemitraan publik-swasta (PPP) dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pembentukan dana abadi pendidikan daerah dapat menjamin keberlanjutan pendanaan jangka panjang, dan kerja sama dengan industri dalam bentuk beasiswa dapat memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Model ini dinilai tepat karena mampu mengurangi ketergantungan fiskal, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta memperluas akses dan kualitas pendidikan.

### 3. Perbandingan dengan negara OECD

<b>Aspek Kebijakan</b>	<b>Praktik Negara OECD</b>	<b>Relevansi untuk Nusantara Raya</b>	<b>Tantangan Implementasi</b>
Performance based budgeting	Anggaran dialokasikan berdasarkan kinerja dan output pendidikan	Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan dana berdampak pada hasil belajar	Sistem penilaian kinerja belum optimal, data belum akurat
Alokasi berbasis kebutuhan siswa	Perdanaan lebih besar diberikan pada siswa di daerah yang membutuhkan	Mengurangi ketimpangan antara wilayah maju dan tertinggal	Validitas data sosial ekonomi siswa masih terbatas
Peningkatan kualitas guru	Pelatihan berkelanjutan dan standar kompetensi tinggi	Meningkatkan kualitas human capital dan hasil belajar siswa	Distribusi guru tidak merata, akses pelatihan terbatas
Evaluasi berbasis data	Kebijakan didasarkan pada data hasil belajar dan indikator pendidikan	Membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien	Infrastruktur data dan sistem informasi belum merata
Sistem digital pendidikan	Integrasi teknologi dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan	Mendukung pemerataan kualitas dan efisiensi pembelajaran	Kesenjangan infrastruktur dan literasi digital

Secara umum, praktik negara OECD relevan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya. Namun, keberhasilan implementasinya sangat

bergantung pada kesiapan data, kapasitas manajemen, serta pemerataan infrastruktur. Oleh karena itu, adopsi kebijakan perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi domestik tiap daerah agar tidak menimbulkan inefisiensi baru.

#### 4. Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan (Proposal 5 Tahun)

---

### **Reformasi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Efisiensi, Pemerataan, dan Kinerja di Nusantara Raya (2026-2030)**

#### **Latar Belakang**

Struktur pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya saat ini masih didominasi oleh belanja rutin, khususnya gaji guru yang mencapai proporsi tinggi, sehingga ruang fiskal untuk pembiayaan yang bersifat produktif seperti infrastruktur, digitalisasi, dan peningkatan kualitas guru menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efektivitas anggaran dalam meningkatkan hasil belajar serta memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga pada efisiensi dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan
2. Mengurangi ketimpangan akses dan kualitas antar wilayah
3. Meningkatkan kualitas guru dan hasil belajar siswa secara berkelanjutan

#### **A. Perubahan Struktur Belanja (Tahun 1–5)**

Tahun	Gaji & Tunjangan Guru	Infrastruktur	Program Siswa (Beasiswa & Subsidi)	Pengembangan guru & Pembelajaran	Administrasi & Lainnya
1	68%	12%	8%	(bagian dari 12%)	12%
2	62%	14%	10%	6%	8%
3	60%	16%	11%	7%	6%
4	58%	18%	12%	9%	3%
5	55%	20%	13%	10%	2%

#### **Penjelasan:**

Reformasi dilakukan melalui penataan ulang komposisi anggaran pendidikan secara bertahap dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan dampak terhadap kualitas pembelajaran. Penurunan proporsi belanja gaji bukan berarti pemotongan upah guru, melainkan hasil dari optimalisasi penempatan dan redistribusi guru. Dengan demikian, kesejahteraan guru tetap terjaga, sementara distribusi tenaga pendidik menjadi lebih merata sesuai kebutuhan.

Adapun perubahan komposisi anggaran meliputi:

- Proporsi gaji guru diturunkan dari sekitar 68% menjadi  $\pm 55\text{--}60\%$  melalui kebijakan redistribusi dan efisiensi
- Anggaran infrastruktur dan digitalisasi ditingkatkan hingga  $\pm 20\%$  untuk mendukung pemerataan fasilitas pendidikan
- Bantuan siswa dinaikkan menjadi  $\pm 10\text{--}12\%$  guna memperluas akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu
- Pelatihan dan pengembangan guru dialokasikan sebesar  $\pm 5\text{--}10\%$  untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran

Peningkatan alokasi pada program siswa dan pengembangan guru diarahkan secara langsung pada perbaikan literasi, numerasi, dan pemerataan kualitas antar sekolah. Secara keseluruhan, reformasi ini bertujuan menggeser pola belanja dari yang bersifat konsumtif menuju belanja produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap peningkatan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

## **B. Strategi Peningkatan Kualitas Guru (Tahun 1–5)**

Upaya peningkatan kualitas guru dilakukan melalui penataan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

1. Penataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan kelas dan lokasi, yaitu memindahkan guru dari daerah yang kelebihan tenaga pendidik (umumnya di perkotaan) ke daerah yang kekurangan guru, terutama wilayah terpencil. Kebijakan ini didukung dengan pemberian insentif.
2. Pemberiaan insentif finansial dan non finansial, seperti tunjangan khusus daerah terpencil serta penyediaan akomodasi sementara, guna meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan penugasan.
3. Pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan nyata di kelas, yang fokus pada penguatan literasi, numerasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan metode pembelajaran inovasi seperti pembelajaran berbasis proyek.
4. Komunitas belajar guru yang difasilitasi secara daring untuk menarik seluruh guru di Indonesia. Komunitas ini sebagai wadah diskusi permasalahan pembelajaran, serta mentoring dari ahli di tingkat pusat.
5. Evaluasi kinerja guru berbasis hasil belajar siswa sebagai indikator utama output pendidikan, sehingga kualitas pengajaran dapat diukur secara lebih objektif dan berorientasi pada dampak.

Strategi ini penting karena kualitas guru merupakan determinan utama dalam pembentukan *human capital* dan berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas serta daya saing jangka panjang.

### **C. Digitalisasi Sekolah**

Digitalisasi dilakukan sebagai strategi percepatan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal serta meningkatkan efisien proses pembelajaran. Implementasinya dilakukan secara bertahap.

1. Pada tahap pertama ini terjadi pada dua tahun pertama (1-2), pemerintah fokus pada penyediaan infrastruktur dasar, yaitu pengadaan laptop serta proyektor untuk sekolah SMP dan SMA di setiap kecamatan terpencil. Selain itu, disediakan akses internet melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk paket data jangka panjang hingga lima tahun, guna memastikan keberlanjutan akses digital di sekolah.
2. Memasuki tahun ke 3-5, dilakukan pengembangan platform pembelajaran digital daerah yang terintegrasi, yang menyediakan modul pembelajaran, bahan ajar digital, serta soal latihan berbasis kurikulum nasional. Platform ini menjadi pusat kegiatan belajar berbasis teknologi sekaligus mendukung standar pembelajaran yang lebih merata.

Untuk mendukung efektivitas implementasi, dilakukan pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran, sehingga guru tidak hanya memiliki akses tetapi juga mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini harus diikuti dengan kewajiban melapor atas aktivitas digital yang dilakukannya, kemudian data tersebut akan menjadi evaluasi kinerja, sehingga kebijakan pendidikan dapat dirumuskan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan strategi ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

### **D. Monitoring dan Evaluasi (Sepanjang Program)**

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, dilakukan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data, kinerja, serta akuntabilitas publik.

1. Diterapkan data driven policy melalui pembangunan sistem data pendidikan berbasis resolusi kecamatan. Setiap kecamatan diwajibkan mengisi data tahunan yang mencakup identitas sekolah. Data tersebut akan menjadi dasar utama dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan pendidikan secara lebih tepat sasaran.
2. Diterapkan pengukuran kinerja berbasis indikator utama yang terintegrasi dengan skema penganggaran berbasis kinerja. Indikator ini meliputi: penurunan ketimpangan skor literasi antara wilayah kota dan desa minimal 20%, penurunan rasio murid dan guru di daerah pedesaan dari 1:40 menjadi 1:25, pencapaian minimal 90% sekolah SMP dan SMA yang memiliki akses internet.

3. Dilakukan audit anggaran secara berkala untuk mencegah inefisiensi dan potensi penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa dana alokasi benar benar digunakan sesuai kebutuhan pendidikan.
4. Dilakukan evaluasi independen setiap dua tahun oleh lembaga eksternal seperti universitas atau lembaga riset untuk meningkatkan efektivitas anggaran serta dampaknya terhadap mutu dan pemerataan pendidikan.
5. Dijaga transparansi pulik melalui penyediaan laporan terbuka yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

### **E. Dampak yang Diharapkan**

Dalam jangka menengah (5 tahun), reformasi ini diharapkan dapat:

- Meningkatkan efisiensi alokasi anggaran pendidikan
- Mengurangi kesenjangan kualitas antar wilayah
- Meningkatkan hasil belajar siswa , khususnya dalam literasi dan numerasi
- Memperkuat kualitas daya saing sumber daya manusia

### **Kesimpulan**

Reformasi pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya dilakukan melalui penataan ulang struktur anggaran, peningkatan kualitas guru, digitalisasi sekolah, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Kebijakan ini diarahkan untuk menggeser belanja dari yang bersifat konsumtif menuju belanja produktif yang berdampak langsung pada peningkatan literasi, numerasi, serta pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah. Dengan implementasi yang terencana dalam lima tahun, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, reformasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia secara berkelanjutan.